



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 1 Pekkabata Polewali

2024





KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Penyusunan LAKIP ini telah mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Satuan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP tahun 2024 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi berbagai program kerja pada tahun 2024, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Visi, Misi dan Strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih juga LAKIP ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Kami menyadari bahwa materi LAKIP ini jauh dari sempurna mengingat bahwa masih banyak kendala yang dihadapi, baik ditinjau dari hasil pelaksanaan kegiatan maupun pengumpulan data kinerja serta cara merumuskan indikator kinerjanya. Namun berkat adanya kordinasi dan bimbingan dari berbagai pihak seperti Bidang-Bidang yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar, maka hasil LAKIP ini dapat diselesaikan.

Demikian yang dapat disampaikan. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2024 ini.

Polewali, 12 Februari 2024

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN
UKM**



ANDI CHANDRA SIGIT, S.T., M.A.P.

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19680714 200604 1 013



IKHTISAR LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar ini memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama Tahun 2024 yang ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran program dan kegiatan yang dimuat di dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja tahunan Tahun 2024 telah ditetapkan 6 (Enam) Program dan 24 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.451.253.215 Dengan rincian sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.3.905.068.733 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.882.838.553 atau 99,43%
2. **Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.10.000.182 dengan realisasi anggaran Rp.9.988.020 atau 99,98%.
3. **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)** dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.10.000.567 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.9.985.340 atau 99,85%.

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

4. **Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**, dengan alokasi anggaran untuk program ini Rp.456.866.592 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.449.139.600 atau 98,31%.
5. **Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.36.337.733 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.29.637.500 atau 81,56%.
6. **Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**, dengan alokasi anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp.32.979.408 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.32.957.562 atau 99,93%



Adapun sasaran strategis dan capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM pada tahun 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	10.00%	7.61%	76,1
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	10.00%	4.99%	49,9
3	Meningkatnya kemandirian dan akuntabilitas koperasi	Persentase koperasi yang aktif dan sehat	100%	100%	100
4	Meningkatnya kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang terstandarisasi dan memiliki legalitas usaha	100%	100%	100
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	BB	BB
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%	100
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
KINERJA RATA-RATA					99.55

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 4.451.106.586,-** dan terealisasi **Rp. 4.431.213.230,-** atau persentase realisasi **99,55%**. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar **99,55%** Kondisi ini memperlihatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar Rp.4.431.213.230.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Maksud dan Tujuan	
1.3 Dasar Hukum.....	
1.4 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	
1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)	
1.6 Isu Strategis Organisasi.....	
1.7 Sistematika	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Organisasi	
2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	
2.3 Penetapan Kinerja	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Akuntabilitas Kinerja	
3.2 Pencapaian Tujuan	
3.3 Analisis Capaian Kinerja	
3.4 Akuntabilitas Keuangan	
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel telah diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang – Undang No. 28 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN. Untuk melaksanakan peraturan tersebut, telah dikembangkan dan diterapkan suatu sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Asas Akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu tahapan utama dalam pengimplementasian SAKIP adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan melalui perhitungan tingkat kemajuan dari pencapaian indikator kinerja strategis/program/kegiatan dibandingkan dengan tujuan/sasaran/target yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan mekanisme pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja yang bermanfaat memberikan informasi bagi pengambil kebijakan mengenai efisiensi dan efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil pengukuran kinerja tersebut merupakan materi pokok untuk penyusunan laporan kinerja. Laporan kinerja tersebut merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran oleh instansi terkait. Oleh sebab itu, instansi pemerintah diwajibkan untuk melakukan penyusunan



laporan kinerja instansi pemerintah yang dikenal dengan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sesuai dengan siklusnya, instansi pemerintah menyusun LAKIP tersebut setelah selesainya pelaksanaan tahun anggaran. LAKIP berisi iktisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LAKIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu: Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Kewajiban penyusunan dokumen LAKIP merupakan tanggung jawab seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop dan UKM) Kabupaten Polewali Mandar melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Anggaran 2024 sebagai bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolak ukur RENSTRA Pembangunan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang mencakup Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja ini menjadi sangat krusial sebagai salah satu materi laporan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi secara ringkas dan lengkap mengenai pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis.

1.3 Dasar Hukum

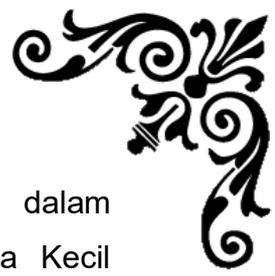
Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2024 ini, sebagai berikut :



- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 : Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;

1.4. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sesuai Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi



dan UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Aspek-aspek strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi (Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM), permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024, dan isu utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing industri lokal dan pengembangan industri kluster serta optimalisasi pemasaran sentra-sentra industri potensial;
2. Peningkatan peran industri kecil dan menengah dalam kegiatan industri besar serta perlunya peningkatan penggunaan bahan baku lokal;
3. Mendorong pembentukan lembaga yang memberikan perlindungan konsumen dalam rangka pengembangan tertib niaga dan perlindungan konsumen;
4. Peningkatan kelancaran sistem distribusi, perdagangan dan kurangnya daya saing komoditas perdagangan dalam mencari pangsa pasar serta belum adanya penyebaran informasi perdagangan local baik di dalam maupun luar negeri khususnya yang berorientasi peningkatan nilai tambah dan ekspor;
5. Perlunya jasa layanan pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif dan unit-unit perdagangan serta produk unggulan yang berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan;



6. Pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatnya partisipasi pedagang ekonomi lemah;
7. Peningkatan sarana prasarana pasar tradisional yang dikelola pemerintah kabupaten;
8. Optimalisasi pelaksanaan tera dan tera ulang alat UTTP di tempat-tempat terjadinya transaksi penggunaan alat UTTP.

Sekretariat

Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. Penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. Penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
- j. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Industri

Bidang Industri mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan industri. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan industri;



- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan industri;
- c. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan industri makanan dan minuman;
- d. Penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan industri non makanan dan minuman;
- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan industri;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan industri; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan perdagangan. Adapun fungsi Bidang Perdagangan adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan perdagangan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan pengelolaan perdagangan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan usaha perdagangan;
- d. Penyelenggaraan sarana dan prasarana perdagangan;
- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis pengembangan dan pengelolaan perdagangan;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan pengelolaan perdagangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen

Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas menyelenggarakan standarisasi perlindungan konsumen. Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan petunjuk teknis standarisasi perlindungan konsumen;



- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional standarisasi perlindungan konsumen;
- c. Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- d. Penyelenggaraan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;
- e. Penyelenggaraan koordinasi teknis standarisasi perlindungan konsumen;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan standarisasi perlindungan konsumen; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan usaha kecil dan menengah;
- e. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan, pengembangan dan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.



STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR





1.5 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dukungan aparatur yang profesional, adaptif, responsif, aspiratif dan memadai; peralatan/sarana yang lengkap; serta organisasi dan manajemen yang kondusif sangat diperlukan untuk mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam proses pelayanan publik. Kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah daerah melalui pembangunan di bidang koperasi dan UKM sebagai urusan wajib, serta pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan sebagai urusan pilihan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar didukung dengan potensi sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan data bulan Januari 2024 jumlah pegawai yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar adalah 41 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan maupun jenis kelamin disajikan melalui Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel . 1. 1

Perkembangan Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	PENDIDIKAN	TAHUN	
		2023	2024
1	S.3	-	-
2	S.2	10	10
3	S.1	21	21
4	DIPLOMA	2	2
5	SMA/SLTA	8	8
TOTAL		41	41

Tabel 1. 2

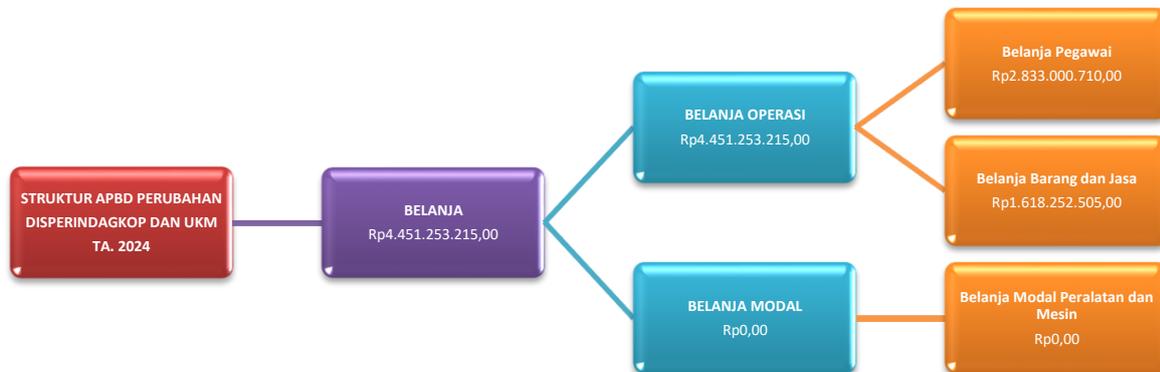
Perkembangan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	JENIS KELAMIN	TAHUN	
		2023	2024
1	LAKI-LAKI	23	23
2	PEREMPUAN	18	18
TOTAL		41	41

Faktor input berupa dukungan SDM, maupun sarana dan prasarana perlu diperkuat dengan dukungan anggaran untuk pencapaian target Dinas Perindustrian,



Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. Dukungan anggaran tersebut disajikan melalui gambar berikut:



Gambar 1.1 Anggaran Disperindagkop-UKM Tahun 2024

1.6 Isu Strategis

Isu strategis yang terkait dengan **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (Perindagkop dan UKM)** dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)** Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 meliputi beberapa fokus utama yang berorientasi pada pengembangan sektor ekonomi lokal. Berdasarkan RPJMD, isu strategis yang terkait antara lain:

1. **Peningkatan Infrastruktur Ekonomi:** Fokus pada pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan sektor industri, perdagangan, koperasi, dan UKM. Hal ini melibatkan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana distribusi perdagangan berupa pasar, pusat distribusi, gudang serta aksesibilitas transportasi yang efisien untuk mendukung kegiatan ekonomi.
2. **Pengembangan Koperasi dan UKM:** Meningkatkan kapasitas dan daya saing koperasi serta UKM melalui berbagai program pemberdayaan, pelatihan, dan akses permodalan. Ini bertujuan untuk menciptakan UKM dan koperasi yang lebih mandiri dan mampu berdaya saing, baik di pasar lokal maupun pasar global.



3. **Penguatan Ekonomi Lokal dan Diversifikasi Produk:** Meningkatkan sektor perdagangan dengan mengoptimalkan produk-produk lokal yang memiliki potensi unggulan serta berorientasi ekspor. Pemanfaatan sumber daya alam dan potensi produk unggulan lokal akan menjadi fokus utama untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan keberagaman produk yang dihasilkan oleh sektor UKM.
4. **Peningkatan Akses Pasar:** Memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal, baik itu melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*), kerja sama antar-daerah, maupun ekspor. Program ini juga mencakup upaya untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih baik bagi produk-produk lokal agar dapat bersaing di pasar yang lebih luas.
5. **Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM):** Program pelatihan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha, khususnya dalam meningkatkan keterampilan manajerial, teknis, dan inovasi produk. SDM yang terampil dan berpengetahuan akan mendukung pengembangan sektor industri, perdagangan, serta koperasi dan UKM.
6. **Pemberdayaan Perempuan dalam Ekonomi:** Salah satu aspek penting dalam isu strategis ini adalah pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi, terutama melalui peningkatan peran perempuan dalam koperasi dan UKM. Ini akan mendukung pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. **Penyederhanaan Regulasi dan Pelayanan Usaha:** Meningkatkan kemudahan dalam proses perizinan dan regulasi bagi pelaku usaha, termasuk dalam hal pendirian koperasi dan UKM. Penyederhanaan regulasi akan mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas ekonominya.
8. **Peningkatan Keseimbangan Pembangunan Antarkawasan:** Memastikan bahwa pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan tidak hanya terpusat di daerah pusat kota, tetapi juga merata ke daerah-daerah perdesaan untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Isu-isu strategis ini sangat penting diperhatikan untuk meningkatkan daya saing daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memperkuat sektor ekonomi lokal yang berbasis pada potensi unggulan daerah.



1.7 Sistematika

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi
- 1.5. Sumber Daya Manusia (SDM)
- 1.6. Isu Strategis
- 1.7. Sistematika

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis Organisasi
 - 2.1.1. Visi
 - 2.1.2. Misi
- 2.2. Penetapan Kinerja
- 2.3. Instrumen Pendukung Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

- 3.1. Akuntabilitas Kinerja
- 3.2. Pencapaian Tujuan
- 3.3. Analisis Capaian Kinerja
- 3.4. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV. PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Bupati Polewali Mandar. Teknis penyusunan visi dan misi dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Polewali Mandar periode 2019-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Perencanaan Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024 merupakan suatu proses awal dalam usaha menuju tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan Strategis tersebut memperhatikan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) organisasi yang telah diidentifikasi secara komprehensif. Perencanaan strategis tersebut memerlukan komponen strategis berupa visi dan misi organisasi.

Modul Perencanaan Berbasis Kinerja dan Perjanjian Kinerja mendefinisikan visi sebagai cara pandang jauh kedepan ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif, dan inovatif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang terkait keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah serta mampu berfungsi sebagai perekat dalam organisasi. Visi dapat memberikan batasan jangkauan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diharapkan untuk tercapai. Pernyataan visi tersebut akan didefinisikan secara operasional oleh misi organisasi karena misi dapat menggambarkan alasan utama organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik serta mempertegas bagaimana organisasi mencapai visi yang telah ditetapkan dalam kurung waktu yang terukur. Visi dan misi Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 sebagai berikut:

2.1.1 Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Kabupaten Polewali Mandar dalam kurun waktu 2019-2024 melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang dibentuknya adalah ***"Polewali***



Mandar Maju, Rakyat Sejahtera". Visi tersebut mengandung makna yang menunjukkan keseimbangan aspek yang hendak diwujudkan dalam periode waktu lima tahun, yaitu:

- Maju : Mempunyai Kualitas dan kemampuan untuk berprestasi dan berdaya saing sehingga masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dari daerah lain, ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup dan tercukupinya kebutuhan kehidupan masyarakat.
- Rakyat sejahtera : Kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, nyaman dan bahagia (*marendeng anna masagena*) dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama budaya dengan baik

2.1.2 Misi

Kabupaten Polewali Mandar telah merumuskan beberapa misi untuk untuk mewujudkan visi organisasi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Religius
2. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah
3. Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas yang Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan.
4. Memanfaatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Polewali Mandar Tahun 2019-2024 diselaraskan dengan visi misi Bupati Polewali Mandar. Sasaran strategis tersebut meliputi:

1. Meningkatnya daya saing usaha industri pengelolaan dan perdagangan
2. Meningkatnya kualitas manajemen Perkantoran
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan kerja
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah

Sasaran strategis tersebut memiliki lima indikator kinerja dengan target setiap tahun selama 5 (lima) tahun perencanaan 2019-2024 secara lengkap sebagaimana



terlampir. Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Setiap program mengklusterisasikan sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut yang dapat mendukung pencapaian tujuan program. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi seharusnya tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Indikator dalam dokumen IKU berlaku lima tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar berperan sebagai penggerak yang akan membantu Kabupaten Polewali Mandar untuk memujudkan visi misinya, khususnya yang terkait dengan kemandirian ekonomi melalui pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM. Berpedoman pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian sasaran strategis organisasi, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut:



Tabel.2.1

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kabupaten Polewali Mandar

Kode	Misi/Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/o utcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												OPD Penanggung jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(10)	(13)	(10)	(10)	(17)	
2	Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah															
2.1	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi yang Merata dan Berkualitas	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	7.34%	7.36%	6,295,09 4,000	7.39%	6,619,5 47,740	7.41%	6,074,000 ,000	7.44%	6,357,000 ,000	7.46%	6,595,000 ,000	6,877,000 ,000		
2.1.1	Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	7.42%	10.93%	6,295,09 4,000	14,45%	6,619,5 47,740	17,96%	6,074,000 ,000	21.48%	6,357,000 ,000	24.99%	6,595,000 ,000	6,877,000 ,000		
		Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	7.55%	9.85%		12,14%		14,44%		16.73%		19.03%				
2.1.1.1	Program Peningkatan Kapasitas Usaha Industri Pengolahan	Persentase pertumbuhan industri :			2,384,95 8,000		2,409,0 00,000		2,487,000 ,000		2,595,000 ,000		2,684,000 ,000	2,781,000 ,000	Disperindagkop dan UKM	
		- Mikro (6.132)	0.70%	0.80%		1.00%		1.02%		1.04%		1.06%				4.92%
		- Kecil (106)	0.02%	0.04%		0.06%		0.08%		0.09%		0.10%				0.37%
		- Menengah (1)	0.001%	0.001%		0.001%		0.001%		0.001%		0.001%				0.01%



	Pembinaan Dan pendampingan Industri Kecil Menengah Makanan Dan Minuman	Jumlah kelompok IKM yang mampu Meningkatkan produk olahan makanan dan minuman yang Berdaya Saing	1,457	222	199,835,000	249	450,000,000	292	487,000,000	322	490,000,000	372	500,000,000	1,457	545,000,000	
	Pembinaan Dan Pendampingan industri Kecil Non Makanan dan Minuman	Jumlah kelompok IKM yang mampu Meningkatkan produk olahan Non makanan dan minuman yang Berdaya Saing	4,782	717	185,144,000	812	459,000,000	956	500,000,000	1,195	505,000,000	1,102	584,000,000	4,782	586,000,000	
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana Industri Kecil Menengah (IKM) yang disediakan	70	12	1,999,979,000	10	1,500,000,000	10	1,500,000,000	10	1,600,000,000	12	1,600,000,000	54	1,650,000,000	
2.1.1.2	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	75.56%	16.53%	100,000,000	17.80%	104,000,000	18.22%	108,000,000	19.49%	113,000,000	19.92%	117,000,000	91.95%	122,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Pembinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Koperasi yang bertambah Asset dan Anggotanya	183	39	100,000,000	42	104,000,000	42	108,000,000	43	113,000,000	46	117,000,000		122,000,000	
2.1.1.3	Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase UMKM yang tumbuh dan berkembang:			59,942,200		100,000,000		150,000,000		175,000,000		200,000,000		250,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan,



	Kecil dan Menengah	- Usaha baru (UM=6.312)	15.00%	15.00%		11.20%		13.40%		15.60%		20.00%				Koperasi dan UKM
		- Mikro - kecil (UMN=1.236)	16.00%	16.00%		8.00%		11.00%		14.00%		20.00%				
		- Kecil - menengah	9.00%	9.00%		3.60%		5.40%		7.20%		10.00%				
	Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang Tumbuh dan berkembang	36,759	480	25,000,000	530	35,000,000	550	55,000,000	600	60,000,000	675	85,000,000	2,835	100,000,000	
	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM	Jumlah jenis produk UMKM yang Terpromosi	30	32	34,942,200	35	65,000,000	37	95,000,000	40	115,000,000	42	115,000,000	42	150,000,000	
2.1.1.4	Program Pengembangan Pengelolaan Pasar	Persentase pasar MARASA (Maju, Rapih, Sehat dan Aman dalam perlindungan konsumen)	-	2.63%	2,933,115,000	5.26%	2,963,000,000	13.16%	3,058,000,000	21.05%	3,191,000,000	26.32%	3,301,000,000	68%	3,420,000,000	Dinas Perindagkop, dan UKM
	Pembangunan Pasar Rayat	Jumlah Pasar Rakyat yg dibangun	30	5	2,733,115,000	5	1,800,000,000	5	1,825,000,000	5	1,830,000,000	5	1,850,000,000	25	1,875,000,000	
	Revitalisasi Manajemen Pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi manajemennya	-	1		2	400,000,000	2	420,000,000	2	430,000,000	2	450,000,000	9	460,000,000	
	Kemitraan Pelaku Usaha Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang Bermitra	5	15	50,000,000	30	250,000,000	35	270,000,000	10	300,000,000	15	325,000,000	105	330,000,000	
	Pelaksanaan Pasar Murah	Jumlah Pasar Murah yang dilaksanakan	10	10	-	15	150,000,000	15	175,000,000	20	200,000,000	20	210,000,000	80	220,000,000	
	Pembinaan dan Penataan Pedagang	Jumlah Pedagang : - Pedagang Baru - Pedagang lama	13	25	150,000,000	35	363,000,000	40	368,000,000	45	431,000,000	50	466,000,000	195	535,000,000	



2.1.1.5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase penyelesaian kasus perlindungan konsumen	20.00%	25.00%	259,000,000	32.00%	262,000,000	48.00%	271,000,000	65.00%	283,000,000	75.00%	293,000,000	100%	304,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah Pengawasan Barang dan Jasa yg dilakukan		90	40,000,000	100	87,000,000	125	90,000,000	150	94,000,000	175	97,000,000	640	100,000,000	
	Pengelolaan Kemetrolgian	Jumlah Alat UTTP yang Ditera / Tera Ulang	10,817	1000	50,000,000	1500	125,000,000	1600	128,000,000	1800	132,000,000	2000	135,000,000	7,900	138,000,000	
	Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Perlindungan Konsumen	Jumlah pengaduan Perlindungan Konsumen yang dilayani		120	39,000,000	200	50,000,000	250	53,000,000	300	57,000,000	350	61,000,000	1,220	66,000,000	



Program penunjang untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

a. Program Manajemen Perkantoran

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem manajemen administrasi pemerintahan dan pembangunan. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.

b. Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada perangkat daerah secara efektif, efisien dan akuntabel.

c. Program Penguatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan pelaporan guna mendukung capaian tujuan pembangunan daerah sesuai, masing-masing perangkat daerah.

2.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan pembangunan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar telah ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dapat mendukung tujuan pembangunan. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Pada dasarnya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerja mengacu pada Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. IKU merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2019-2024 yang merupakan penjabaran dari target kinerja RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024.



Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar maka indikator yang dipakai dalam Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel.2.2
IKU Disperindagkop dan UKM 2019-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Formula
1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	$\frac{\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100$
2	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	$\frac{\text{Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan} = \text{PDRB sektor perdagangan (t)} - \text{PDRB sektor perdagangan (t-1)}}{\text{PDRB sektor perdagangan (t-1)}} \times 100$
3	Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder	$\frac{\text{Jumlah IKM stakeholder atau survey kepuasan pelayanan manajemen perkantoran secara berkala}}{\text{Jumlah jenis pelayanan manajemen perkantoran yang dilakukan survey}}$
4	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	<p>Hasil review Inspektorat atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah, meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Kinerja Predikat SAKIP meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - AA > 90-100 : Sangat Memuaskan - A > 80-90 : Memuaskan - BB > 70-80 : Sangat Baik - B > 60-70 : Baik - CC > 50-60 : Cukup



		- C > 30-50 : Kurang - D > 0-30 : Sangat Kurang
5	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni keseusaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini Pengelolaan Keuangan dikeluarkan oleh BPK RI

2.3 Penetapan Kinerja

Kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia dapat diwujudkan melalui dokumen perjanjian kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sesuai ketentuan, Perjanjian kinerja 2024 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang disusun berdasar pada rencana strategis (Renstra) 2019-2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan yang tergambar melalui dua indikator, yaitu : persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dan persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran.
2. Meningkatnya kualitas Manajemen Perkantoran yang tergambar dari indikator indeks kepuasan masyarakat/stakeholder.



3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja yang tergambar melalui indikator predikat SAKIP perangkat daerah.
4. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah yang tercermin dari indikator berupa opini pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam meningkatkan pertumbuhan sektor rill tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2024 :



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM

Jl. K. H. Wahid Hasyim Nomor 1 Pekkabata

Telepon. 0428-21423 Faks. 0428-21423



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ANDI CHANDRA SIGIT, ST., MAP**

Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**

Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

ANDI CHANDRA SIGIT, S.T., M.A.P.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19680714 200604 1 013



**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran terhadap PDRB	4.99%	10.00%
2	Meningkatnya kemandirian dan akuntabilitas koperasi	Persentase koperasi yang aktif dan sehat	100%	100%
3	Meningkatnya kapasitas usahamikro, kecil dan menengah	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang terstandarisasi dan memiliki legalitas usaha	100%	100%
4	Meningkatnya peran sektor industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7,61%	10%
5	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	BB	A
		Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset perangkat daerah	100%	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Sangat Baik

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,999,037,268	APBD
2	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 15,689,782	APBD
3	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 10,000,567	APBD
4	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 25,715,192	APBD
5	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp 45,047,523	APBD
6	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp 44,161,408	APBD
JUMLAH		Rp 4,139,660,740	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM

ANDI CHANDRA SIGIT, ST., MAP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19680714 200604 1 013



Anggaran yang dikelola Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) 2024 melaksanakan Program dan Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.451.253.215,00 dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut:

No.	Program	Sub Kegiatan	Anggaran
PAGU OPD Dinas Perindagkop dan UKM			4.451.253.215
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.292.402
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.947.057
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.615.710
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.641.500
		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.833.000.710
		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.314.896
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.696.300
		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	16.011.084
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.916.400
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.153.830
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	3.340.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	208.044.900
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	577.200
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan listrik	182.497.588
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.300.000
		Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.279.156
Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.440.000		



2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	10.000.182
3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10.000.567
4	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	456.866.592
5	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	20.002.390
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	16.335.343
6	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	18.422.936
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	14.556.472



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan perencanaan strategis dan rencana kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka pembangunan sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, maka evaluasi kinerja tersebut juga menyajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Mengukur kinerja pada hakikatnya melakukan penilaian apakah kinerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya.

Analisis capaian kinerja dalam LAKIP Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir pengukuran kinerja. Perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja menunjukkan persentase capaian kinerja. Nilai capaian kinerja seratus persen (100%) atau lebih menunjukkan bahwa target indikator kinerja utama telah terpenuhi, sedangkan nilai capaian kinerja di bawah seratus persen (100%) menunjukkan bahwa target dalam perjanjian kinerja belum terpenuhi sehingga perlu ditindaklanjuti dalam proses perencanaan selanjutnya. Formula pengukuran capaian kinerja terdiri atas dua jenis yang penggunaannya disesuaikan dengan karakter indikator kinerja masing-masing. Jenis formulasi yang pertama digunakan untuk mengukur capaian indikator kinerja yang semakin baik jika nilainya semakin besar, sedangkan formulasi yang kedua digunakan untuk mengukur kinerja yang semakin baik jika nilainya semakin kecil. LAKIP Tahun 2024 menggunakan metode perhitungan dengan pendekatan



kinerja yang semakin baik jika nilai perhitungannya semakin besar. Formula atau rumus yang digunakan untuk mengukur realisasi capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut.

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana(target)}} \times 100\%$$

3.2. Pencapaian Tujuan

Suatu Pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran-pengukuran kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pengambilan keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pembangunan sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM diharapkan menghasilkan nilai tambah yang setinggi-tingginya, menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, meningkatkan penerimaan daerah, serta meningkatkan dan pemeratakan pembangunan keseluruhan wilayah Kabupaten Polewali Mandar sehingga mampu meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing masyarakat.

Tujuan jangka menengah Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 telah ditetapkan ke dalam empat poin. Tujuan tersebut meliputi:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan religius merupakan salah satu faktor input utama yang dimiliki organisasi untuk pencapaian sasaran organisasi. Peran SDM bagi organisasi tidak hanya dilihat dari hasil produktivitas kerjanya tetapi juga dapat dilihat dari kualitas kerja yang dihasilkan dan kemampuan untuk memanfaatkan secara tepat sumber daya lainnya untuk kepentingan organisasi.

2. Memperkuat kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan wilayah.

Pembangunan yang memanfaatkan potensi unggulan wilayah dapat menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktifitas dan investasi serta membantu sektor-sektor swasta dan



masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kemandirian ekonomi dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian untuk dikembangkan dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia adalah sektor industri. Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah salah satu proses perubahan secara terus menerus guna meningkatkan pendapatan perkapita dan kenaikan itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat.

4. Meningkatkan daya saing ekonomi yang merata dan berkualitas.

Akselerasi pertumbuhan ekonomi cenderung masih bergerak lambat. Kondisi tersebut tidak terlepas dari lemahnya kinerja sektor manufaktur yang berdampak pada kian lemahnya daya saing produk di pasar. Oleh sebab itu, peningkatan daya saing ekonomi perlu dilakukan secara komprehensif sehingga mampu meningkatkan mutu persaingan tersebut ke arah kompetisi yang produktif.

Secara garis besar sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2024 telah dicapai oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar dengan kinerja (*performance*) sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Peran Sektor Industri Pengolahan dalam Pertumbuhan Ekonomi

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	10%	5.20%	52,00

Tabel 3.2
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kemandirian dan Akuntabilitas Koperasi

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Koperasi yang Aktif dan Sehat	100%	100%	100



Tabel 3.3
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Terstandarisasi dan Memiliki Legalitas Usaha	100%	100%	100

Tabel 3.4
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dalam Pertumbuhan Ekonomi

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	10%	7.93%	79,30

Tabel 3.5
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	78,88
2.	Persentase Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	100%	100%	100
3.	Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	92,96

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan kinerja yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.



Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didalamnya terdapat beberapa sub pelaksana baik setingkat bidang maupun seksi sebagai pelaksana program dan kegiatan maka segala pencapaian komponen Renstra harus senantiasa berkorelasi dengan tugas dan fungsi masing-masing Sub Pelaksana Program dan Kegiatan sesuai dengan tingkat kewenangan yang diberikan.

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Daya Saing Usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	10%	5.20%	52,00
2.	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	10%	7.93%	79,30

Sasaran strategis ini didukung oleh dua indikator yakni persentase laju pertumbuhan PRDB sektor industri pengolahan dan persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran. Pada indikator **“Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan”** pencapaiannya pada tahun 2024 sebesar 10 persen dengan realisasi capaian sebesar 5,20 persen sedangkan pencapaiannya pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 10 persen capaian realisasi sebesar 7,61 persen sehingga capaian kinerja sebesar 76,1 persen. Realisasi capaian untuk indikator **“Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran”** tahun 2024 adalah sebesar 7,93 persen dengan target 10 persen. Sedangkan pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 10 persen dengan capaian realisasi sebesar 4,99 persen sehingga capaian kinerja sebesar 49,90 persen. Realisasi capaian yang tidak mencapai 100 persen perlu menjadi perhatian pengambil kebijakan untuk melakukan langkah strategis terhadap sasaran tersebut. Analisis tren yang dapat dilihat pada diagram garis (*line chart*) yang disajikan, menunjukkan tingginya target yang ditetapkan dinas jika dibandingkan capaian beberapa tahun ke belakang. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian target dengan memperhatikan hambatan (*constraint*) berupa anggaran yang ada. Ada dua opsi yang dapat dilakukan, yaitu penurunan target atau peningkatan input untuk mencapai target yang



tinggi tersebut. Gambaran tren capaian realisasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat kita lihat pada *line chart* berikut :

Indikator Kinerja Sasaran I

Line Chart. 3.1

Capaian realisasi indikator kinerja sasaran



Indikator Kinerja Sasaran II

Line Chart 3.2



Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik

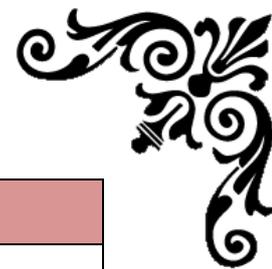


Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Hasil pengukuran kinerja mendorong organisasi untuk dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar harus melakukan proses identifikasi tantangan dan peluang tersebut agar dapat mempertahankan kinerja yang telah berhasil dicapai dan memperbaiki kinerja yang belum berhasil dicapai. Hal tersebut akan membantu Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar untuk meningkatkan kinerja sesuai tupoksi utamanya berkaitan dengan perumusan kebijakan teknis, pelayanan umum dan pembinaan serta pengembangan di bidang perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM di Kabupaten Polewali Mandar.

Tantangan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi tantangan tersebut. Sedangkan peluang merupakan faktor eksternal yang mendukung kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mendorong tercapainya sasaran strategis yang direncanakan. Adapun tantangan dan peluang yang dapat menghambat atau mendukung pencapaian sasaran strategis terkait perindustrian disajikan pada tabel berikut.

Tantangan	Peluang
<ol style="list-style-type: none">1. Penguasaan teknologi industri pelaku industri masih rendah.2. Masih rendahnya jumlah industri pengolahan berbasis bahan baku komoditi pangan yang merupakan unggulan Daerah (27,07%).3. Skala Industri pengolahan dominan mikro dan kecil (95%) .4. Masih rendahnya daya serap sektor industri pengolahan terhadap angkatan kerja hanya sekitar 10,36%.5. Serapan jumlah tenaga kerja disektor industri sangat kecil (10,36%)	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah pelaku usaha industri cukup banyak.2. Kebijakan-kebijakan Kementrian Perindustrian dalam rangka peningkatan daya saing IKM.3. Sumber daya alam tersedia memadai dan dapat dioptimalkan dalam rangka mengembangkan potensi industri.4. Adanya dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha rakyat (KUR) untuk memperkuat dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

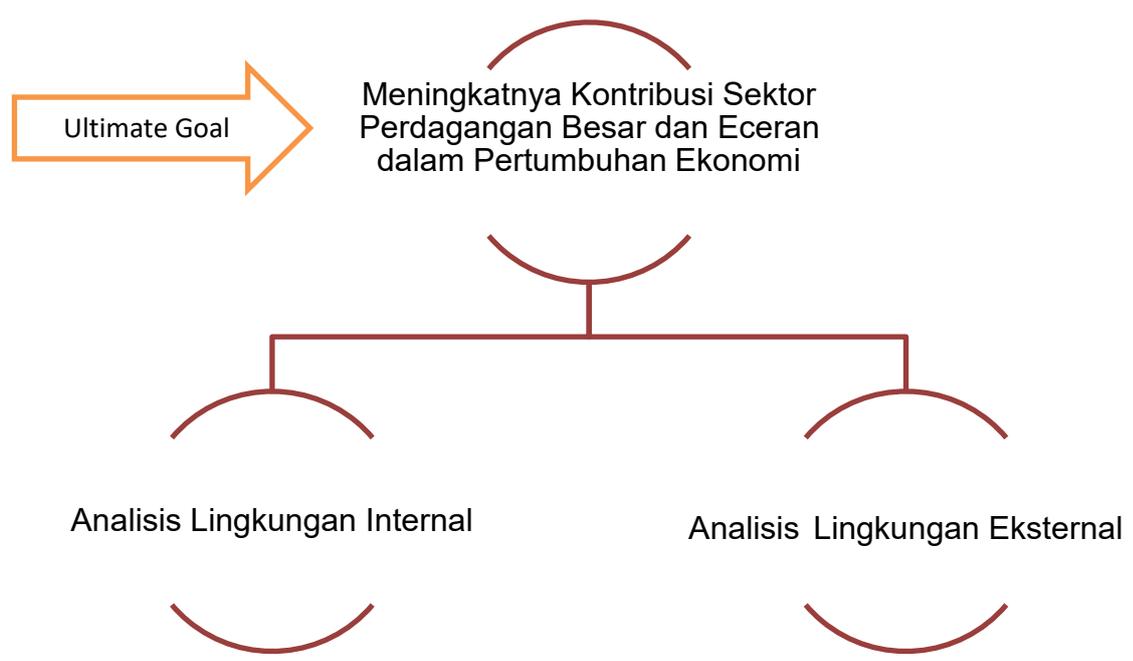


Alternatif solusi yang diupayakan:
a. Mengembangkan budaya industri guna mendorong kemajuan perekonomian Daerah
b. Mendorong kemandirian dan daya saing industri lokal
c. Meningkatkan daya saing Produk unggulan Daerah
d. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui proses industri dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat
e. Mengoptimalkan Koordinasi dalam rangka kerjasama peningkatan SDM, penguasaan Teknologi Industri dan Pengolahan berbasis bahan baku unggulan Daerah bagi pelaku Industri dan wirausaha baru.
f. Fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memperkuat dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Adapun sejumlah program dan kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran **Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan**, sebagai berikut :

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 345.520.400	Rp. 344.520.400	99,71
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 345.520.400	Rp. 344.520.400	99,71
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Rp. 298.115.000	Rp. 297.675.000	99,85
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 47.405.400	Rp. 46.845.400	98,82

Tantangan yang dapat menghambat serta peluang yang dapat mendukung pencapaian sasaran strategis untuk peningkatan daya saing perdagangan besar dan eceran dapat disajikan melalui analisis lingkungan internal dan eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT dapat dimanfaatkan untuk merumuskan alternatif solusi yang dapat diupayakan untuk perbaikan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang terkait langsung dengan kinerja sektor perdagangan. Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut disajikan sebagai berikut.

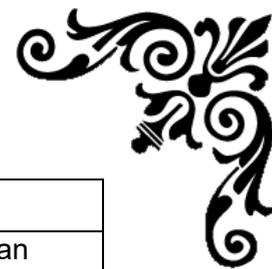


<p>A. KEKUATAN (pendukung internal)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pelaku usaha di bidang perdagangan, sektor perdagangan menjadi kontributor terbanyak ke dua terhadap penyerapan tenaga kerja setelah sektor pertanian (23% atau 48,3 ribu jiwa) berdasarkan Laporan Statistik Ketenagakerjaan BPS (2020); 2. Fasilitas sarana perdagangan khususnya pasar rakyat telah tersedia di setiap kecamatan sehingga dapat memperlancar distribusi barang khususnya bahan pokok dan bahan penting. 3. Regulasi yang semakin sederhana untuk mendukung sektor perdagangan. 	<p>B. PELUANG (pendukung eksternal)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi strategis Polewali Mandar berada di wilayah yang dapat menghubungkan daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur sehingga dapat meningkatkan aktivitas perdagangan antara Kabupaten Polewali Mandar dengan daerah lainnya; 2. Kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>), berdasarkan Data Statistik <i>E-Commerce</i> 2024 menunjukkan pelaku <i>E-Commerce</i> berasal dari Lapangan Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Motor.
<p>C. KELEMAHAN (penghambat internal)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya saing usaha perdagangan yang ditandai dengan masih tingginya persentase jumlah pedagang kecil (86%); 2. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha perdagangan yang ditandai dengan masih tingginya persentase usaha perorangan (71%); 3. Masih rendahnya tingkat ekspor Kabupaten Polewali Mandar. 	<p>D. ANCAMAN (penghambat eksternal)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inflasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perdagangan; 2. Penetrasi produk luar negeri sebagai akibat dari perdagangan bebas mengancam pertumbuhan omset pedagang lokal; 3. Ancaman instabilitas iklim perdagangan nasional dan internasional.



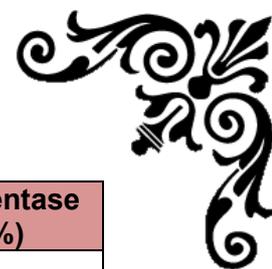
Matriks SWOT Bidang Perdagangan

<p>Lingkungan Internal</p> <p>Lingkungan Eksternal</p>	<p>Kekuatan (Strengt/S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya pelaku usaha dibidang perdagangan, 2. Fasilitas sarana perdagangan khususnya pasar rakyat telah tersedia disetiap kecamatan; 3. Regulasi yang semakin sederhana mendukung pertumbuhan sektor perdagangan 	<p>Kelemahan (Weakness/W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya daya saing usaha perdagangan, 2. Rendahnya kapasitas kelembagaan usaha perdagangan; 3. Masih rendahnya tingkat ekspor Kabupaten Polewali Mandar.
<p>Peluang (Opportunity/O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi strategis Polewali Mandar berada diwilayah yang dapat menghubungkan daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur; 2. Kemajuan teknologi mendorong pertumbuhan perdagangan elektronik (<i>e-commerce</i>). 	<p>Strategi SO¹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan aktivitas perdagangan dalam daerah bahkan antar daerah dan antar pulau dengan memanfaatkan konektivitas laut; 2. Mendorong pelaku usaha untuk memperluas bentuk aktivitas perdagangan, bukan hanya perdagangan konvensional tapi juga perdagangan elektronik. 	<p>Strategi WO³</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong pertumbuhan pedagang besar yang bermitra dengan pedagang kecil dengan memanfaatkan posisi strategis Polewali Mandar; 2. Mendorong pertumbuhan pelaku usaha baru non-perorangan (badan usaha) yang beorientasi ekspor baik secara konvensional ataupun secara elektronik.



Ancaman (Treats/T)	Strategi ST ²	Strategi WT ⁴
1. Inflasi yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi khususnya sektor perdagangan; 2. Persentasi produk luar negeri sebagai akibat dari perdagangan bebas mengancam pertumbuhan omset pedagang lokal; 3. Ancaman instabilitas iklim perdagangan nasional dan internasional..	1. Memastikan pengawasan dan kelancaran distribusi barang untuk mencegah terjadinya inflasi yang berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan sektor perdagangan dengan memanfaatkan fasilitas sarana perdagangan yang ada; 2. Revitalisasi pasar rakyat agar masyarakat senang berbelanja dipasar rakyat untuk mengurangi dampak penetrasi produk asing terhadap omset pedagang.	1. Memberdayakan pedagang kecil agar perannya dalam rantai distribusi barang sebagai pengecer dapat optimal sehingga dapat mencegah dampak negatif dari inflasi; 2. Mendorong pelaku usaha yang ada untuk berorientasi ekspor sehingga dapat menjadi penyeimbang dari penetrasi produk asing.

Implementasi strategi yang telah dirumuskan melalui analisis SWOT perlu disesuaikan dengan program dan kegiatan yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan agar capaian kinerja untuk sasaran strategis yang terkait dengan kontribusi sektor perdagangan dapat dioptimalkan. Adapun sejumlah program dan kegiatan yang telah diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran **Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran**, sebagai berikut :



Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	456.866.592	449.139.600	98,31
Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	456.866.592	449.139.600	98,31
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	456.866.592	449.139.600	98,31
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	36.337.733	29.637.500	81,56
Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	36.337.733	29.637.500	81,56
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	20.002.390	14.588.890	72,94

Program dan kegiatan yang telah dilakukan perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kondisi perekonomian daerah. Penyesuaian target maupun program dan kegiatan sangat diperlukan untuk perbaikan kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.

Sasaran Strategis selanjutnya yang perlu dielaborasi adalah sasaran yang terkait peningkatan kualitas manajemen perkantoran. Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator yakni Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder. Target capaian kinerja untuk sasaran strategis peningkatan kualitas manajemen perkantoran ditetapkan dalam kategori sangat baik yang dapat diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat/stakeholder. Realisasi pada tahun 2024 sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan nilai realisasi sebesar

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Sangat Baik	Sangat Baik	92,96

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) karena mampu menggambarkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat



masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan publik. IKM ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan atau produk tertentu yang disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sehingga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan atau produk, serta untuk memahami kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilayani. Pedoman pelaksanaan survei IKM Pelayanan Publik bagi Instansi Pemerintah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam pelaksanaannya penyelenggara pelayanan publik diwajibkan melakukan survei kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Kegiatan penyusunan IKM ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh unit penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya untuk mendapatkan umpan balik secara berkala atas kinerja/kualitas pelayanan yang diberikan oleh dinas kepada masyarakat sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Terdapat 9 Indikator Penilaian dalam survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap :

1. Pelayanan Harga Sembako
2. Pendirian Koperasi/ Pembukaan Cabang Koperasi
3. Layanan Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha
4. Pelayanan Tera/ Tera Ulang

Pelayanan Publik pada Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Polewali Mandar. Adapun hasil survey IKM terhadap pelayanan publik yang dimaksud, adalah sebagai berikut.



Tabel 3.5
 Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
 PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
 PELAYANAN HARGA SEMBAKO**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ΣNilai /Unsur	64	64	63	64	64	64	64	63	64	
NRR / unsur	3.556	3.556	3.500	3.556	3.556	3.556	3.556	3.500	3.556	
NRR tertbg/ unsur	0.395	0.395	0.389	0.395	0.395	0.395	0.395	0.389	0.395	3.543
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan									88.58	

IKM UNIT PELAYANAN
88.58
Sangat Baik

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99



Tabel 3.6
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
(PENDIRIAN KOPERASI /PEMBUKAAN CABANG KOPERASI)**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	3	3	4	3	3	3	3	3
3	3	3	3	4	3	3	4	4	4
4	3	3	3	4	3	3	4	4	3
5	4	3	3	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	3	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	4	3	4	4	4	4	4	4	4
9	3	4	4	3	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	3	3	4	4	4	4	4	4	4
12	4	4	4	3	4	4	4	4	4
13	3	4	4	4	4	4	4	3	4
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	4	4	4	4	3	4	4	3	4
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	3	3	4	4	3	4	4	4	3
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	4	3	4	4	4	4	4	4	4
22	3	4	3	4	4	4	4	3	3
23	3	3	3	4	3	3	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	3	3	4	3	4	4	3	3
27	3	4	3	4	3	3	4	3	3
28	3	3	4	3	3	4	4	3	3
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	3	4	3	4	4	3	4	3	3
31	4	4	4	4	4	3	4	4	3
32	4	4	4	4	4	4	4	3	4
33	4	4	4	4	3	3	3	3	3
34	3	3	4	4	4	3	4	4	4
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	3	3	3	4	3	4	4	3	4
37	3	3	3	4	3	3	4	3	3
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4



40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	3	3	4	4	4	3	4	4	4	
43	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ΣNilai /Unsur	156	160	164	171	162	164	173	163	164	
NRR / unsur	3.545	3.636	3.727	3.886	3.682	3.727	3.932	3.705	3.727	
NRR tertbg/ unsur	0.394	0.404	0.414	0.432	0.409	0.414	0.437	0.412	0.414	3.730
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										93.245

IKM UNIT PELAYANAN
93.24
Sangat Baik

Mutu Pelayanan :

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99



Tabel 3.7
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	3	4	4	4	3	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	3	4	3	3	3	4	4	3	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ΣNilai /Unsur	55	56	54	53	53	55	55	52	53	
NRR / unsur	3.929	4.000	3.857	3.786	3.786	3.929	3.929	3.714	3.786	
NRR tertbg/ unsur	0.437	0.444	0.429	0.421	0.421	0.437	0.437	0.413	0.421	3.857
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										96.429

IKM UNIT PELAYANAN
96.43
Sangat Baik

Mutu Pelayanan :

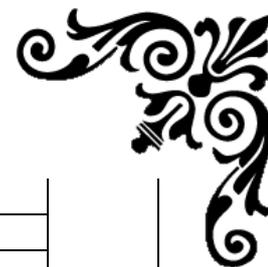
- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99



Tabel 3.8
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN
PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	3	4	3	4	3	3	3	4	4
3	3	4	4	4	3	3	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	3	3	4	4	4	4	4	4
6	4	4	3	4	3	3	4	3	4
7	4	3	3	4	4	3	4	4	3
8	4	3	3	4	3	3	4	4	4
9	4	4	4	4	3	4	3	3	3
10	3	3	3	4	4	3	3	3	4
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	3	3	4	4	3	3	3	3	4
13	4	4	4	4	3	4	3	3	4
14	3	3	4	4	4	3	4	4	4
15	3	4	3	4	3	4	3	3	4
16	3	4	3	4	4	3	4	4	4
17	4	4	3	4	4	4	4	4	4
18	4	3	3	4	4	4	3	4	4
19	4	4	3	4	4	4	4	4	4
20	4	3	4	4	4	4	4	4	3
21	4	4	4	4	3	4	4	3	4
22	3	4	3	4	3	4	4	4	4
23	4	4	3	4	4	3	3	4	3
24	3	3	3	4	3	4	3	3	4
25	4	4	4	4	3	3	4	3	4
26	3	4	3	4	4	3	3	4	4
27	4	4	3	4	3	3	3	3	3
28	4	3	4	4	4	3	4	3	3
29	4	3	3	4	4	4	3	4	4
30	3	3	4	4	4	3	3	3	3
31	4	3	4	4	4	4	4	4	4
32	4	3	4	4	4	4	4	4	4
33	4	4	4	4	3	4	4	4	3
34	3	4	3	4	4	3	3	4	3
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	4	3	4	4	4	4	4	3	4
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	4	3	4	4	4	4	4	4	4



41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
47	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
48	4	4	4	3	4	4	4	4	3	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
52	3	3	3	4	4	4	4	4	4	
53	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
57	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
62	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
65										
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
ΣNilai /Unsur	263	257	257	275	261	260	262	260	264	
NRR / unsur	3.757	3.671	3.671	3.929	3.729	3.714	3.743	3.714	3.771	
NRR/unsur (tambahan sub unsur)	3.757	3.671	3.671	3.929	3.729	3.714	3.743	3.714	3.771	
NRR tertbg/ unsur	0.417	0.408	0.408	0.437	0.414	0.413	0.416	0.413	0.419	3.744
Hasil Konversi IKM Unit pelayanan										93.611

IKM UNIT PELAYANAN
93.61
Sangat Baik

Mutu Pelayanan

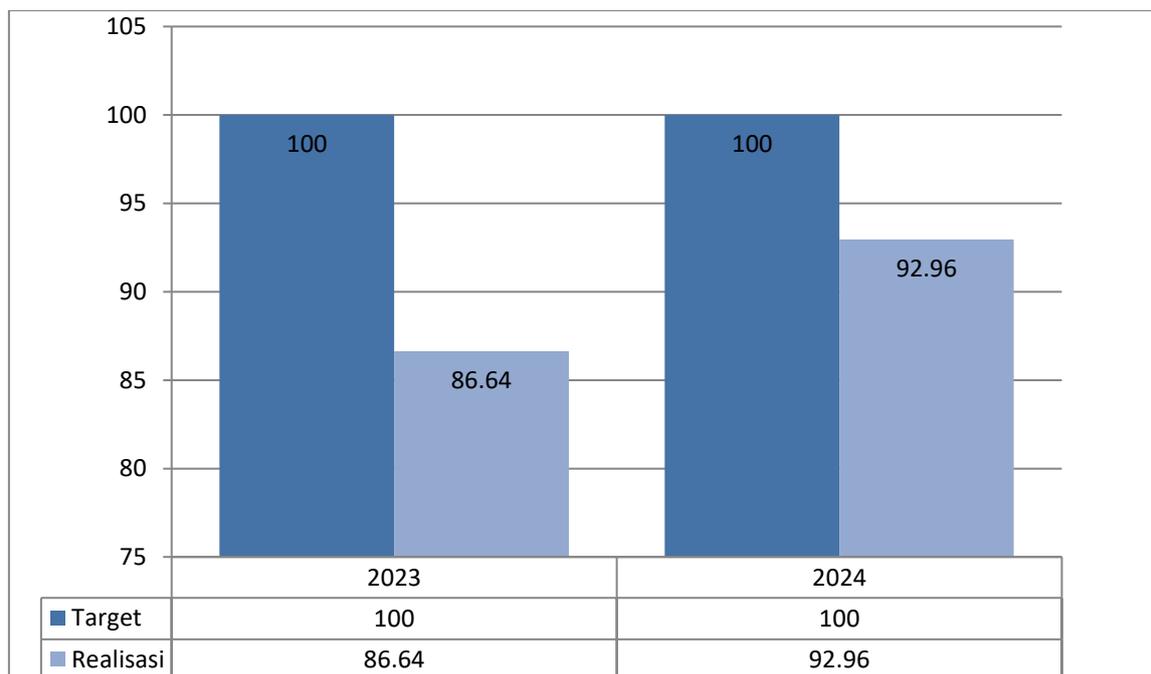
- A (Sangat Baik)** : 88,31 - 100,00
- B (Baik)** : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik)** : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik)** : 25,00 - 64,99



Tabel 3.8
Rekap Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NO	JENIS SURVEY KEPUASAN	SKOR
1	PELAYANAN HARGA SEMBAKO	88,58
2	PENDIRIAN KOPERASI /PEMBUKAAN CABANG KOPERASI	93,24
3	LAYANAN PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA	96,42
4	PELAYANAN TERA/TERA ULANG	93,61
Average Survey Kepuasan		92,96
Mutu Pelayanan :		Sangat Baik

Chart. 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik
Dinas Perindagkop dan UKM 2023-2024



Dapat dilihat dari perbandingan *chart* diatas hasil rata-rata skor atau indeks dari hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar pencapaian pada tahun 2023 dan 2024 meskipun tidak jauh beda namun ada peningkatan sebesar 6,32%. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar sadar akan perlunya meningkatkan kinerja pelayanan publik.



Adapun tantangan dan peluang serta alternative solusi yang diupayakan dalam indikator sasaran strategis diatas, antara lain:

Tantangan	Peluang
<ol style="list-style-type: none">1. Kondisi bangunan Gedung Kantor2. Yang sebagian dalam kondisi kurang layak3. Kondisi ruangan yang panas dan sempit4. Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana kerja5. Terbatasnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan6. Kendaraan oprasional sarana pelayanan masih kurang terutama roda 27. Keterbatasan SDM terutama tenaga teknis termasuk PTT8. Area parkir roda 2 dan 4 tidak memadai	<ol style="list-style-type: none">1. Terdapat area yang dapat digunakan untuk tempat parkir kendaraan2. Ruangan untulk pelayanan sudah tersedia3. Sarana gedung kantor sudah tua dan mulai lapuk sehingga sangat layak untuk dilakukan rehabilitasi

Alternatif solusi yang diupayakan :
<ol style="list-style-type: none">a Perlunya pengadaan sarana prasarana kerjab Pengadaan pendingin ruanganc Perlunya rehabilitasi gedung kantord Pembangunan area parkir



Adapun sejumlah Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran **Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran**, sebagai berikut :

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.905.068.733	3.882.838.553	99,43
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.496.669	25.468.157	99,89
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.292.402	5.292.402	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.947.057	6.920.045	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.615.710	7.614.810	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.641.500	5.640.900	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.837.315.606	2.837.315.560	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.833.000.710	2.833.000.710	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.314.896	4.314.850	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.162.514	278.157.296	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.696.300	3.696.300	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.011.084	16.011.084	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.916.400	25.916.400	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.153.830	21.153.830	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.340.000	3.340.000	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.044.900	208.039.382	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	678.374.788	666.624.550	98,27
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	577.200	577.200	100



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.497.588	182.347.350	99,92
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.300.000	483.700.000	98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	85.719.156	75.272.990	87,81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	83.279.156	72.832.990	87,46
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.440.000	2.440.000	100

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (86,00)	BB (78,88)	100%

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Perencanaan Kinerja dilakukan secara berjenjang. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan *review* oleh Inspektorat.

Kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan capaian kinerja dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya:

1. Pembuatan atau penyusunan laporan akuntabel
2. Penyampaian laporan secara tepat waktu
3. Pengelolaan administrasi keuangan mengikuti standar sesuai aturan yang berlaku



Tantangan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas SDM sangat dibutuhkan 2. Sarana dan Prasarana masih sangat kurang 3. Pengelolaan IT yang masih sangat terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan Beban tugas yang di emban semakin luas 2. Sebagai OPD yang berposisi sebagai fasilitator bidang industri dan perdagangan bagi IKM dan UKM maka mutlak dibutuhkan sarana dan prasarana 3. Potensi pasar bagi IKM dan UKM semakin terbuka sehingga dibutuhkan pengelolaan IT secara optimal.

Alternatif solusi yang diupayakan :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana dan prasarana kerja 2. Penambahan personil yang memiliki basic ilmu tentang pengelolaan keuangan 3. Penguasaan terhadap pengoperasian sarana IT bagi staf perlu ditingkatkan

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja**, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.468.157	25.468.157	99,89
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.496.669	25.468.157	99,89
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.292.402	5.292.402	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.947.057	6.920.045	99,61
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.615.710	7.614.810	99,99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.641.500	5.640.900	99,99



**Sasaran Strategis 4 :
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Meningkatnya Kualitas pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat daerah	WTP	Belum Rilis	100%

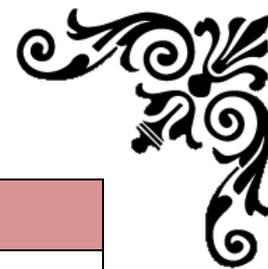
Pada aspek sasaran strategis ini, Opini pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dikeluarkan oleh BPK yang merupakan *output* terhadap pemeriksaan laporan keuangan yang tujuannya adalah untuk memeriksa laporan keuangan. Tujuan dipeliksanya laporan keuangan adalah untuk memberikan pernyataan kewajaran atas laporan keuangan. Wajar atau tidaknya hasil pemeriksaan laporan keuangan ini yang kemudian melahirkan opini-opini apakah itu WTP, WDP, TW atau *disclaimer*.

Memperhatikan capaian Opini BPK dalam 2 tahun terakhir, Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 memperoleh predikat WTP dan WDP pada Tahun 2024, maka diharapkan untuk Tahun Anggaran 2024 ini dapat kembali memperoleh predikat WTP, Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang memberikan kontribusi dalam pencapaian Opini WTP Adapun kontribusi Dinas perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar dalam pencapaian opini WTP, antara lain :

1. Pembuatan atau penyusunan laporan yang akuntabel
2. Penyampaian laporan secara tepat waktu
3. Pengelolaan administrasi keuangan sesuai standar aturan yang berlaku

Opini WTP diberikan dengan kriteria bahwa sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atau pos-pos laporan keuangan, dengan kata lain, secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa opini WTP merupakan bentuk pernyataan atas kewajaran terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan yang berpedoman pada SAP sehingga dengan predikat WTP maka pengelolaan keuangan telah memenuhi standar-standar dalam prinsip *good governance*. Adapun tantangan dan peluang serta alternative solusi yang diupayakan dalam sasaran strategis diatas, adalah sebagai berikut :



Tantangan	Peluang
1. Kontribusi OPD terhadap penilaian pada peringkat WTP perlu semakin ditingkatkan	1. Sarana IT (aplikasi yang menunjang) mengenai pengelolaan keuangan sudah tersedia dan terstandar

Alternatif solusi yang diupayakan :
1. Peningkatan kualitas SDM dan /atau kualitas SDM yang memiliki basis ilmu yang memadai

Adapun Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.314.896	4.314.850	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.314.896	4.314.850	100%

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar, yang termuat dalam, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2024, anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar adalah sebesar Rp.4.451.106.586,- yang direalisasikan sebesar 99.18 %. Terdapat SiLPA Rp.36.696.640,- atau 0,82, %. Adapun rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan program/ kegiatan yang ingin dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:



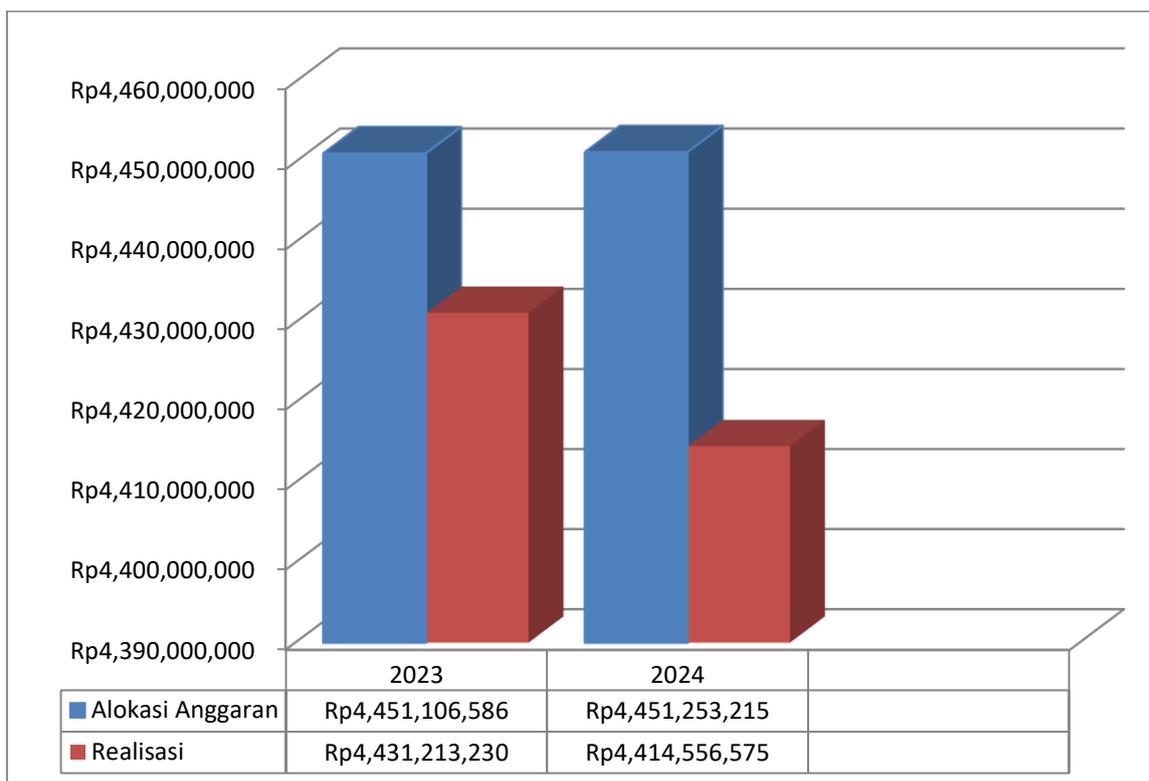
No	Program	Sub Kegiatan	APBD-P 2024	Realisasi	%
PAGU OPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM			4.451.253.215	4.414.556.575	99,18
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.292.402	5.292.402	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.947.057	6.920.045	100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.615.710	7.614.810	100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.641.500	5.640.900	100
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.833.000.710	2.833.000.710	100
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.314.896	4.314.850	100
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.696.300	3.696.300	100
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.011.084	16.011.084	100
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.916.400	25.916.400	100
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.153.830	21.153.830	100
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.340.000	3.340.000	100
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	208.044.900	208.039.682	100
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	577.200	577.200	100
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.497.588	182.347.350	99,92
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	495.300.000	483.700.000	97,66
		Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasi atau Lapangan	83.279.156	72.832.990	87,46
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.440.000	2.440.000	100
		2	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan poembangunan sarana dan prasarana industri	18.422.936
Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	14.556.472			14.556.472	100
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	10.000.182	9.988.020	99,98
4	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	10.000.567	9.985.340	99,85
5	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	456.866.592	449.139.600	98,31
6	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang	20.002.390	14.588.890	72,94
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	16.335.343	15.048.610	92,12



Realisasi anggaran yang ideal tercermin dari penyerapan anggaran yang merata. Tingkat realisasi anggaran yang tinggi dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi daerah serta pembangunan sesuai tupoksi dinas dapat berjalan efisien dan efektif. Realisasi sebesar 99,18 persen dari anggaran yang disediakan mencerminkan adanya upaya yang serius oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut demi mengoptimalkan tugasnya dalam memberikan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya. Adapun alokasi dan realisasi belanja tersebut disajikan pada grafik berikut.

Chart. 3.4

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Perindagkop dan UKM tahun 2023 - 2024





**NILAI EFISIENSI PADA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%	% EFISIENSI
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Dalam Pertumbuhan Ekonomi							
	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	10.00%	7.93%	79,30	456.866.592	449.139.600	98,31	1,69
2	Meningkatnya Kemandirian dan Akuntabilitas Koperasi							
	Persentase koperasi yang aktif dan sehat	100%	100%	100	10.000.182	9.998.020	99,98	0,02
3	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah							
	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang terstandarisasi dan memiliki legalitas usaha	100%	100%	100	10.000.567	9.985.340	99,85	0,15
4	Meningkatnya Peran Sektor Industri Pengolahan Dalam Pertumbuhan Ekonomi							
	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	10%	5,20%	52,00	32.979.408	32.957.562	99,93	0,07
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah							
	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Sangat Baik	Sangat Baik	92,96	3.931.450.070	3.902.520.303	99,26	0,74
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	BB (86,00)	BB (78,88)	78,88 %	5.641.500	5.640.900	99,99	0,01
	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	N/A (Belum Rilis)	N/A	4.314.896	4.314.850	99,99	0,01
JUMLAH					4.451.253.215	4.414.556.575	99,18	



BAB IV PENUTUP

1.1. KESIMPULAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar pada Tahun 2024 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2024 dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024 berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik, dimana terdapat lima dari tujuh indikator kinerja sasaran strategis yang telah tercapai targetnya. Capaian tersebut didapatkan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar melalui realisasi penggunaan anggaran belanja daerah sebesar Rp.4.414.556.575,- dari pagu anggaran sebesar Rp.4.451.253.215,-. Kinerja keuangan antara target dan realisasi empat sasaran kinerja yang didukung oleh kegiatan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan hasil capaian sebagai berikut :

1. Dari 4 sasaran pencapaian dengan 5 indikator, realisasi keuangannya adalah sebesar 99,18 % dari rencana anggaran
2. Capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2024, menunjukkan rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis sebesar 99,18%.



Peningkatan kinerja organisasi untuk periode selanjutnya akan menjadi fokus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar melalui perbaikan langkah-langkah strategis dalam perencanaan kerja, penyesuaian sasaran kinerja, serta peningkatan kemampuan personil untuk melaksanakan program dan kegiatan secara lebih terencana, terukur, dan sistem. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan juga akan dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar.

1.2. SARAN

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas-tugas umum Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM bagi para pelaku usaha industri dan perdagangan mengenai penguasaan teknologi informasi agar tercipta modal insani di bidang perindustrian dan perdagangan yang berdaya saing.
2. Pengolahan berbasis bahan baku unggulan daerah bagi pelaku industri dan wirausaha baru serta meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam melalui proses industri agar pendapatan masyarakat semakin meningkat.
3. Pembinaan terhadap pelaku UKM perlu ditingkatkan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan daya saing produk agar dapat memperluas jangkauan pasar baik domestik maupun internasional.
4. Pengembangan usaha perkoperasian terutama koperasi sektor rill perlu ditingkatkan.
5. Edukasi kemitrologian terhadap para pelaku usaha baik industri, perdagangan perlu ditingkatkan.
6. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Polewali Mandar berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.